



BENARKAH INDONESIA DARURAT UTANG?

Saat ini, kebutuhan pembangunan di Indonesia sangat besar dan mendesak. Indeks Pembangunan Manusia masih lebih rendah dibandingkan sejumlah negara lain.

Untuk itu, pemenuhan pendidikan, kesehatan, dan fasilitas dasar menjadi prioritas utama untuk menciptakan kualitas SDM Indonesia yang produktif dan kompetitif.

Krisis ekonomi yang terjadi tahun 1998/1999 silam menyebabkan Indonesia berbenah mengelola dampak krisis agar perekonomian tetap stabil serta memastikan lembaga keuangan sehat dan kuat.

Akibatnya, selama kurun waktu hampir 20 tahun pembangunan infrastruktur tertunda sehingga pembangunan infrastruktur menjadi kebutuhan saat ini.

Ketertinggalan infrastruktur dan masalah konektivitas menimbulkan tingginya biaya ekonomi yang harus ditanggung oleh masyarakat hingga rendahnya daya saing nasional.

Inilah yang menjadi dasar pemerintah mengakselerasi pembangunan infrastruktur demi mengejar ketertinggalan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Saat ini, ketidakpastian ekonomi global membuat pemerintah mengambil kebijakan fiskal ekspansif untuk mendorong perekonomian tetap tumbuh dan melindungi masyarakat.

APBN disusun untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang mendesak dan tidak dapat ditunda.

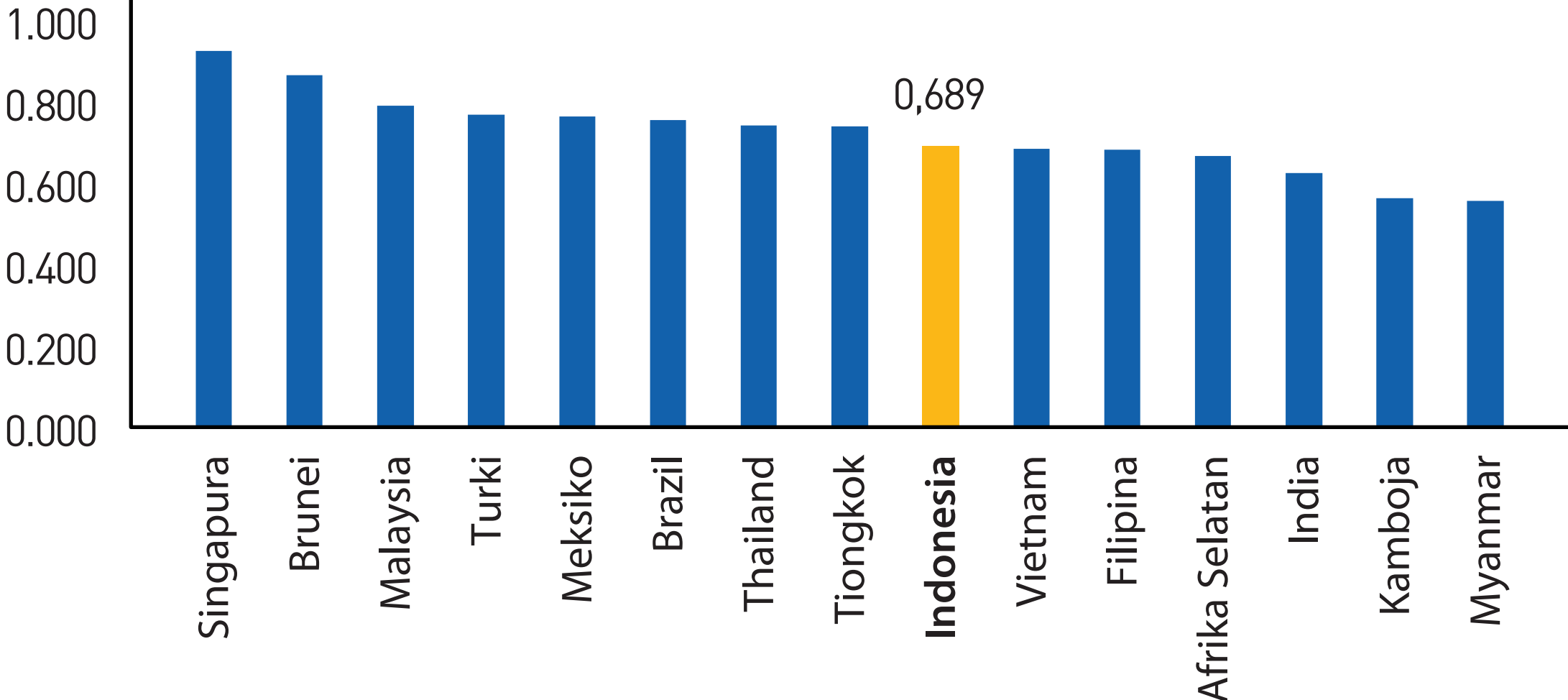
Namun demikian, penerimaan negara belum cukup untuk memenuhi seluruh kebutuhan tersebut sehingga menimbulkan defisit yang harus ditutupi melalui pembiayaan untuk belanja produktif.

Dalam APBN, belanja produktif meliputi 20 persen anggaran pendidikan dan 5 persen anggaran kesehatan.

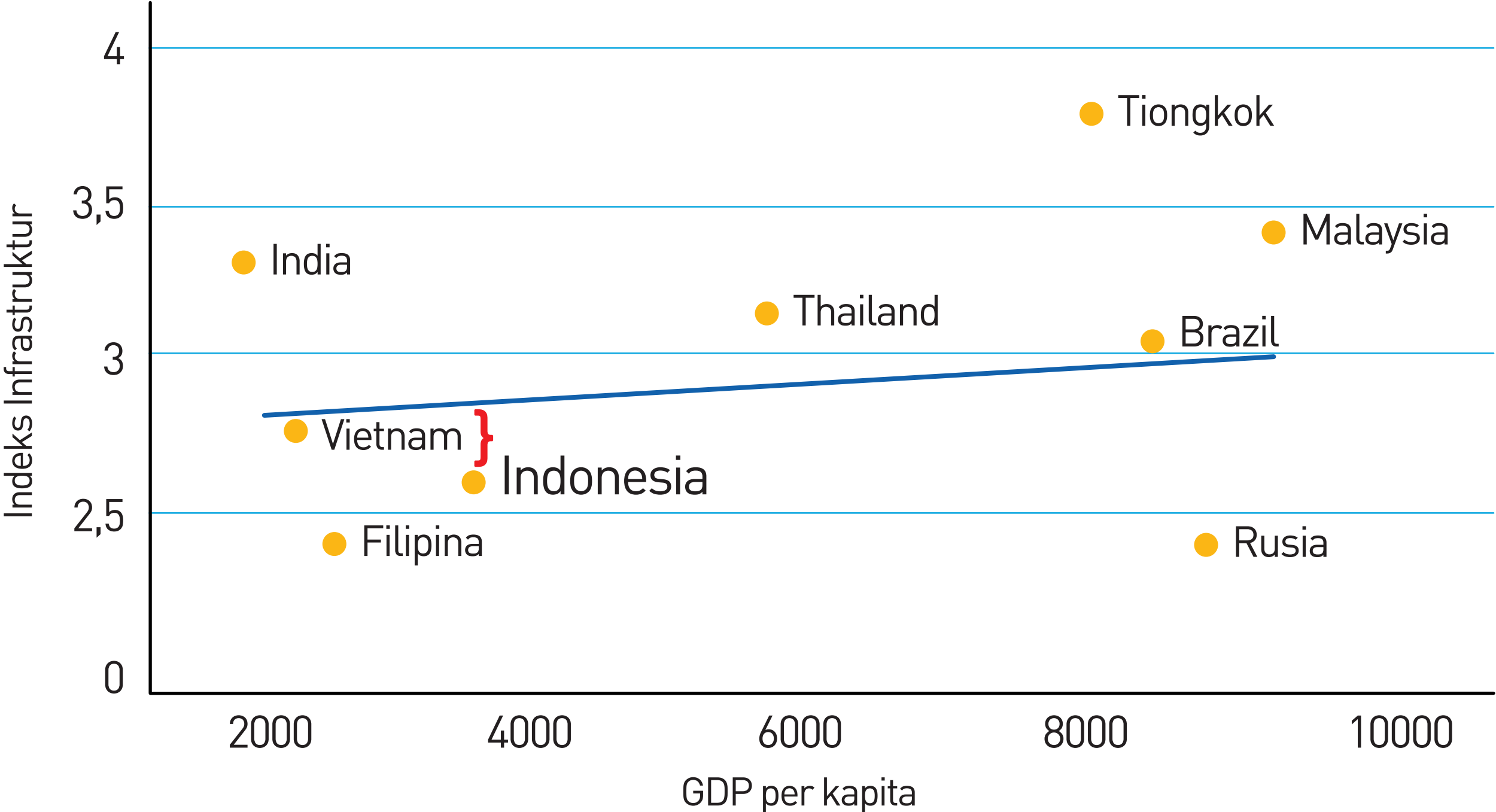
Selain itu, guna mengejar ketertinggalan pembangunan, anggaran infrastruktur diupayakan tumbuh signifikan setiap tahun.

Terbukti, rata-rata dalam lima tahun terakhir, pertumbuhannya mencapai 22 persen.

Indeks Pembangunan Manusia
Tahun 2015

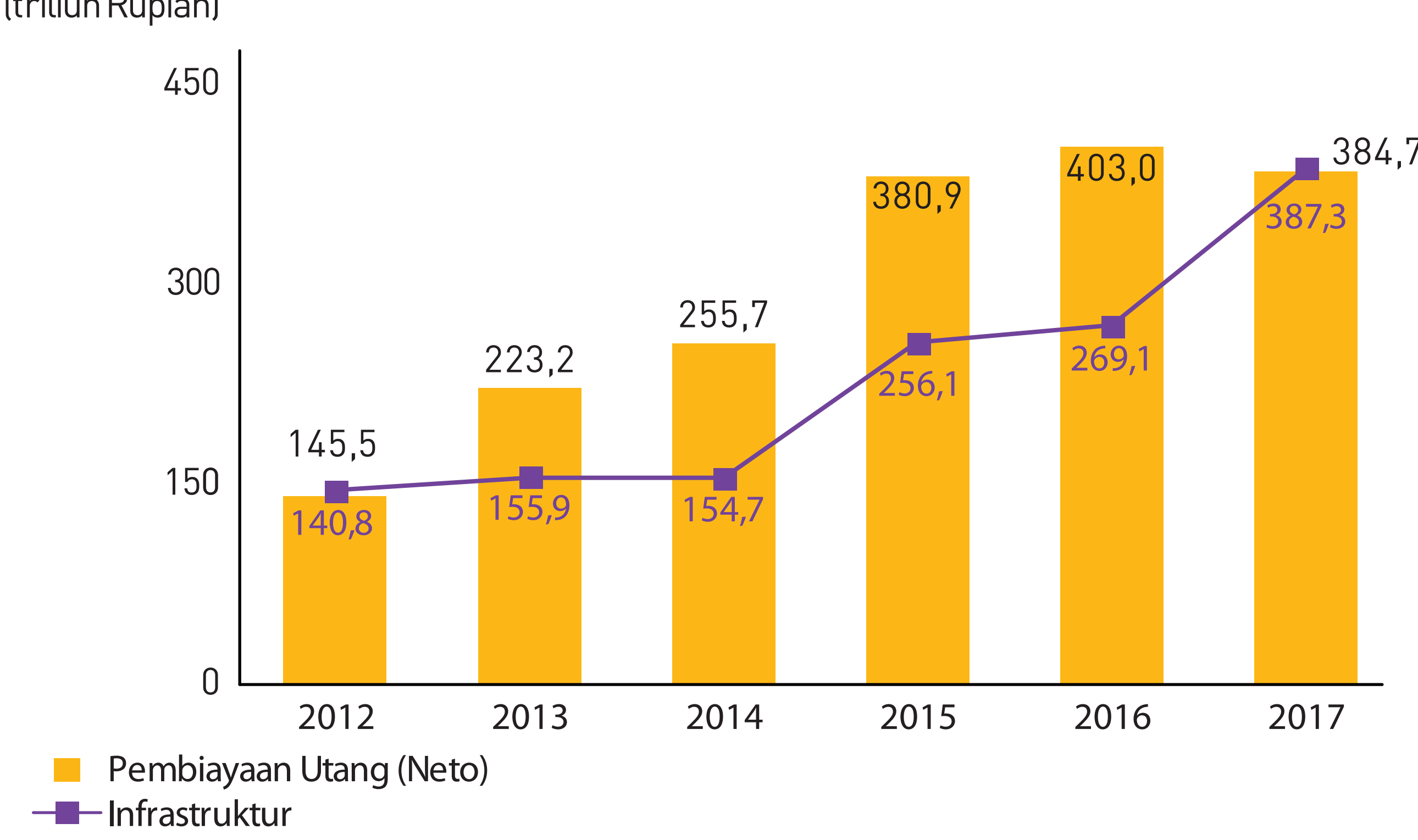


Indeks Infrastruktur 2016



Penyediaan infrastruktur Indonesia masih di bawah rata-rata negara lain yang setara.

Perkembangan Pembiayaan Utang (Neto)
dan Anggaran Infrastruktur



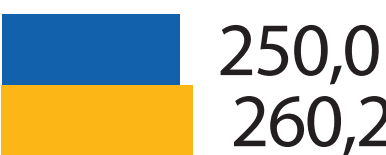
Pendapatan Negara



Penerimaan Perpajakan



PNBP



Hibah



Postur APBN 2017
Postur APBN-P 2017
(triliun Rupiah)

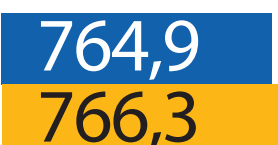
Belanja Negara



Belanja Pemerintah Pusat



Transfer ke Daerah dan Dana Desa



Pembiayaan Anggaran

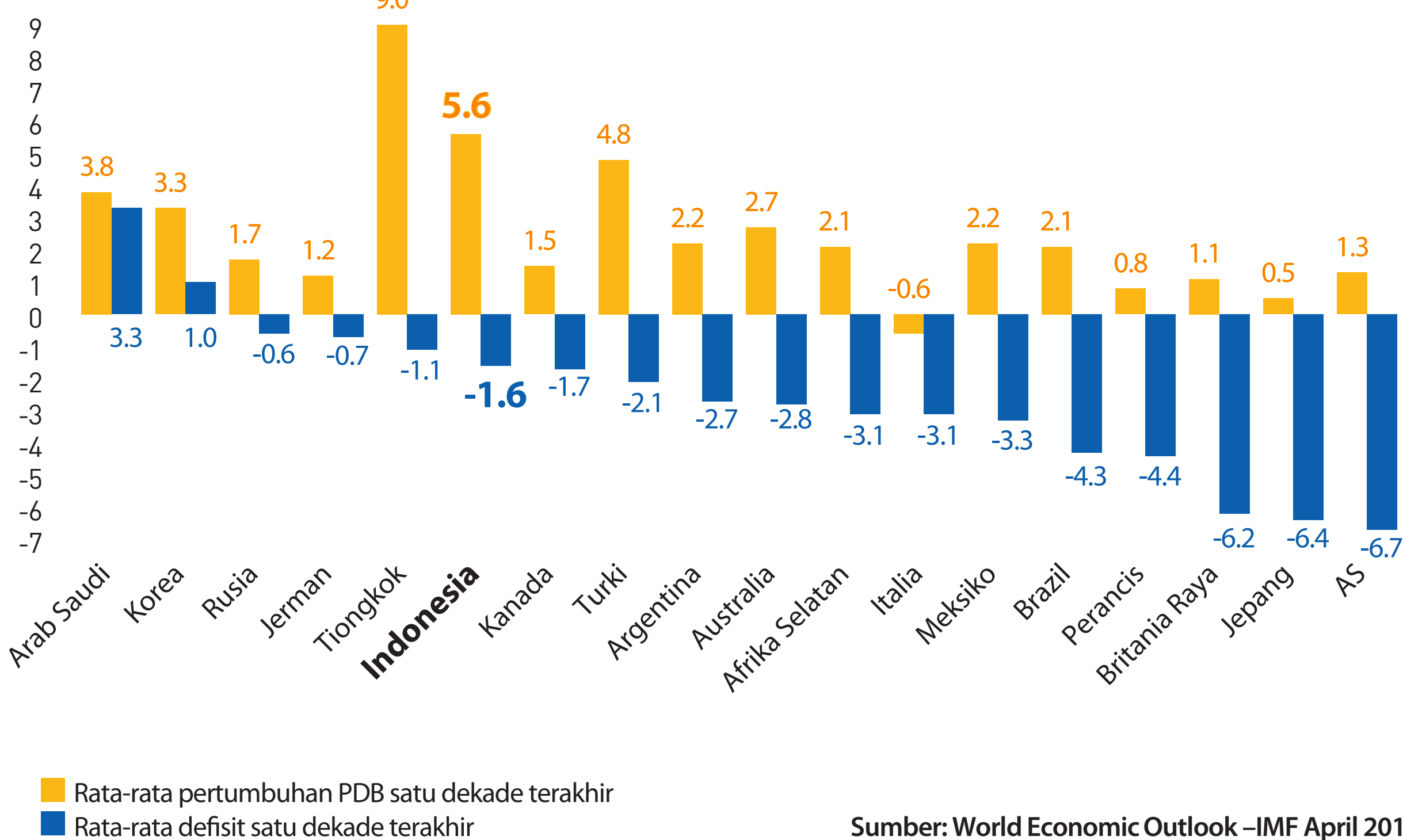


BENARKAH INDONESIA DARURAT UTANG?

Indonesia dengan defisit yang rendah, menjadi salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi yang paling tinggi.

Dengan kata lain, tambahan utang menjadi lebih kecil bila dibandingkan tambahan manfaat yang diperoleh. Inilah yang disebut utang dikelola dengan baik, terjaga dan hati-hati.

Defisit Fiskal Indonesia Produktif



Sumber: World Economic Outlook –IMF April 2017, CEIC.

Hal ini juga didukung oleh dunia internasional.

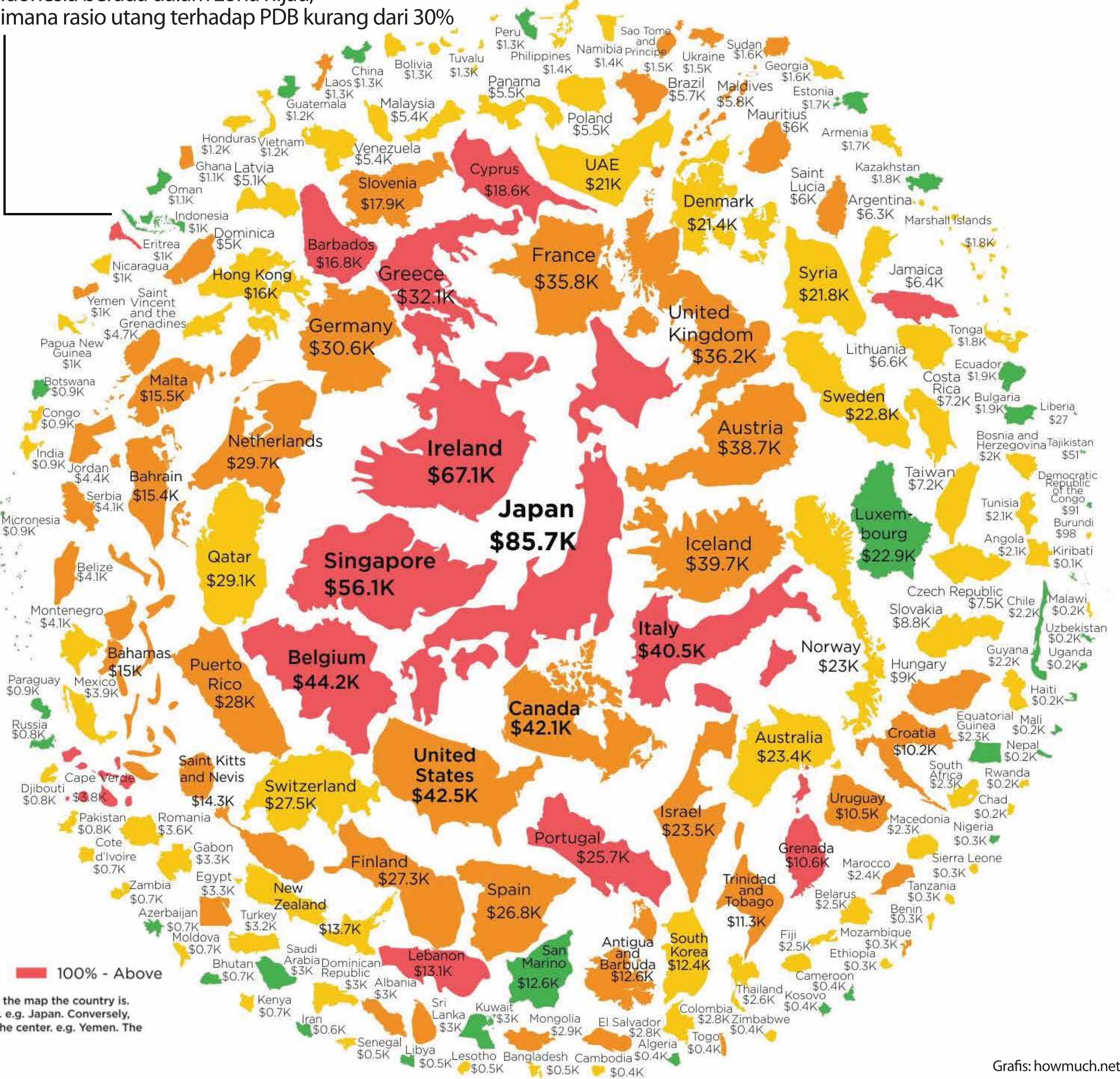
PERINGKAT KREDIT INDONESIA	
Fitch	Investment grade sejak Desember 2011
Moody's	Investment grade sejak Januari 2012
S&P	Investment grade sejak Mei 2017

Saat ini 3 lembaga pemeringkat kredit internasional telah menggolongkan Indonesia sebagai negara 'layak investasi' (investment grade).

Hal ini berarti, Indonesia dianggap mempunyai kemampuan bayar yang tinggi dengan risiko gagal bayar yang sangat rendah.

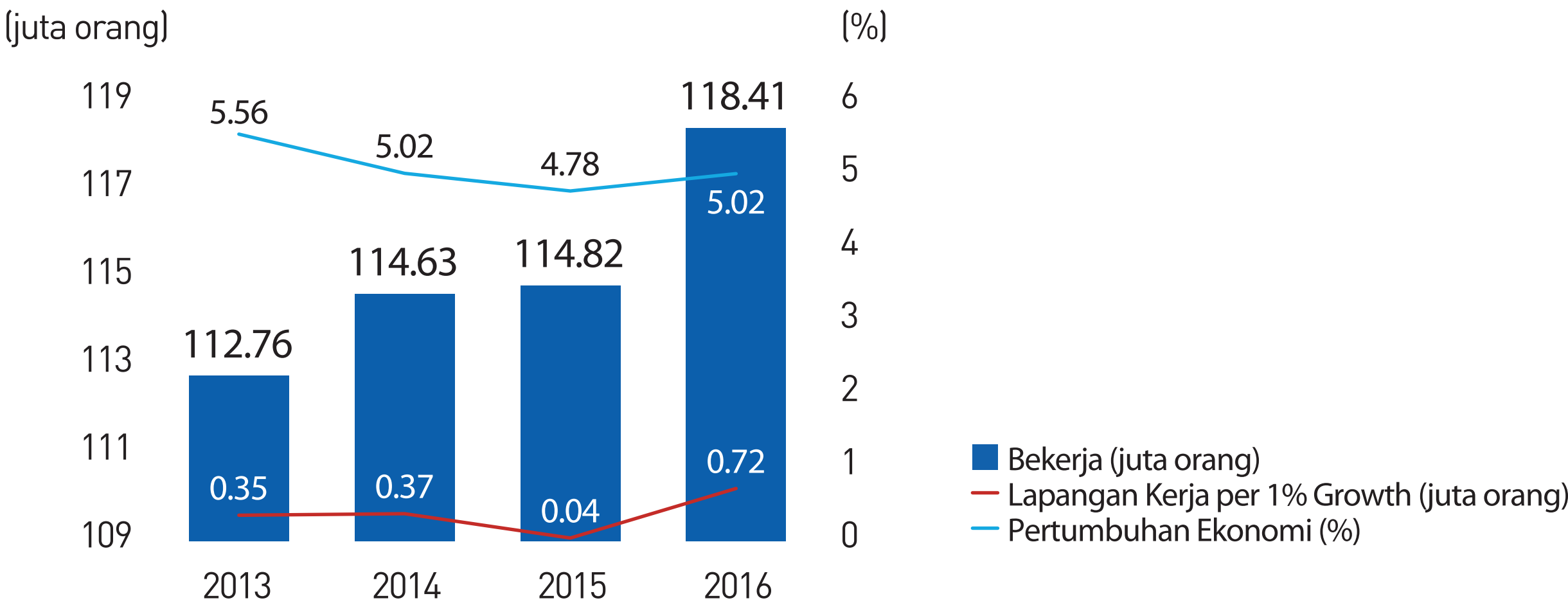
The Snowball of Debt

Indonesia berada dalam zona hijau, dimana rasio utang terhadap PDB kurang dari 30%



Lapangan Kerja Tahun 2013-2016

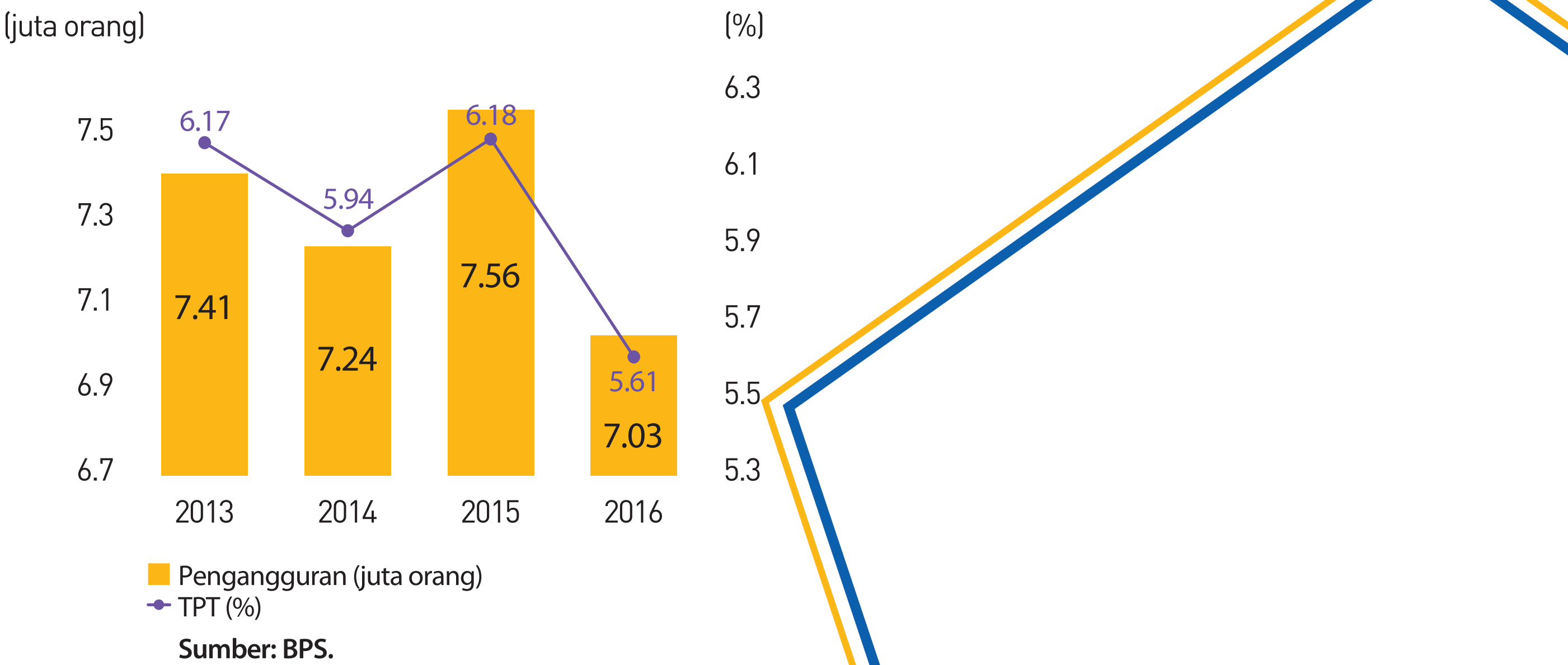
Pertumbuhan Ekonomi Mampu Menciptakan Lapangan Kerja



Melalui pengelolaan utang yang hati-hati dan pertumbuhan ekonomi yang tetap terjaga maka lapangan kerja akan tercipta.

Terbukti, jumlah orang yang bekerja meningkat dari 112,76 juta orang menjadi 118,41 juta orang selama kurun waktu tahun 2013-2016.

Jumlah dan Tingkat Pengangguran



BENARKAH INDONESIA DARURAT UTANG?

Bila dibandingkan dengan negara lain, rasio utang terhadap PDB dan tingkat per kapita tahun 2016, Indonesia menjadi salah satu negara yang paling rendah nilainya.

Utang pemerintah memang meningkat. Namun, jika dilihat perbandingannya dengan Produk Domestik Bruto (PDB), utang Indonesia masih tetap terkendali.

Pemerintah akan terus melakukan reformasi perpajakan untuk meningkatkan penerimaan negara dan menjaga keberlangsungan (sustainabilitas) keuangan negara.

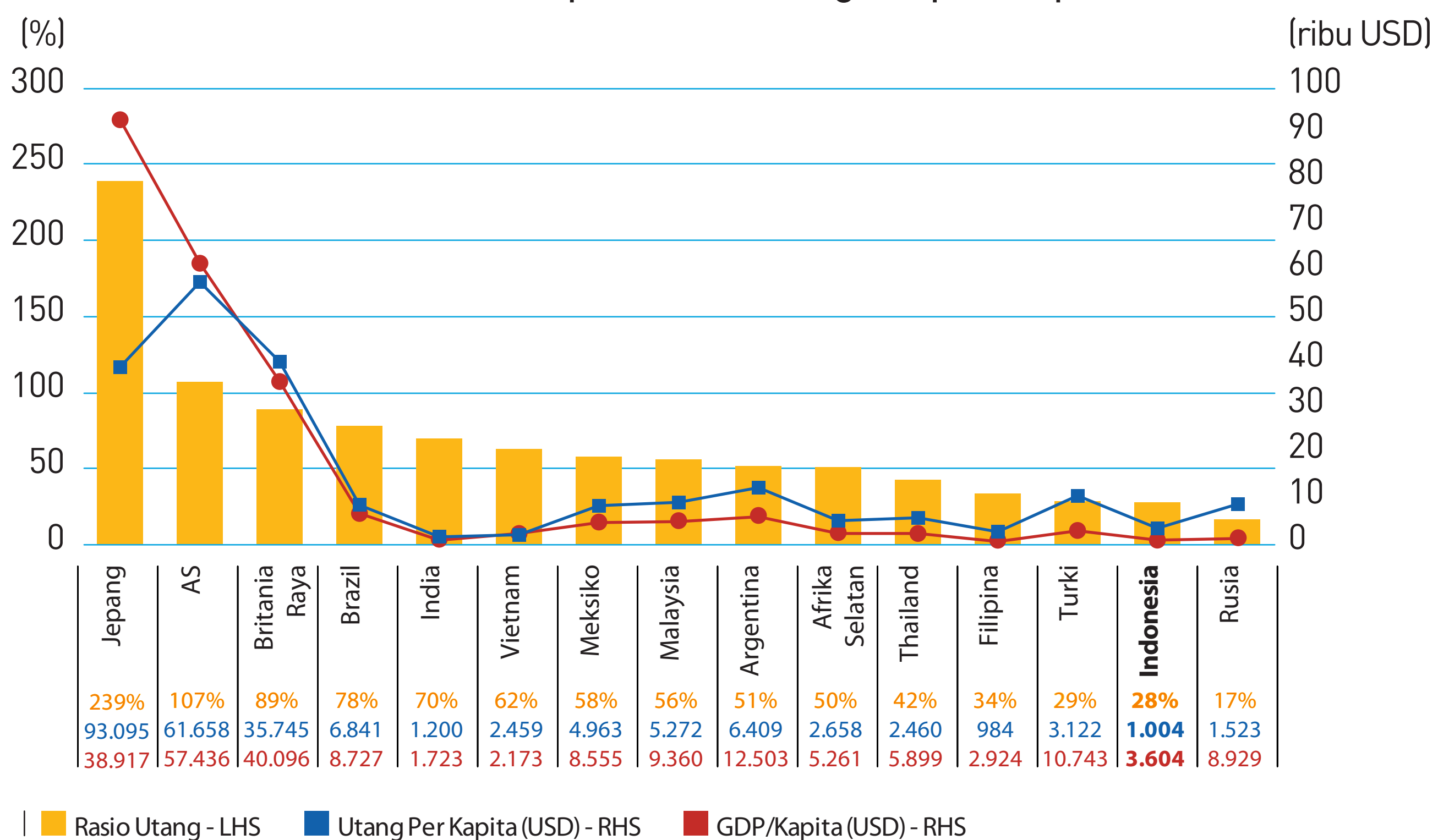
Kondisi ini menciptakan ketahanan dan kesinambungan fiskal.

Rasio Beban Bunga terhadap belanja Indonesia (8,3%) relatif lebih rendah dibandingkan dengan negara setara seperti Meksiko (9,7%), Filipina (16,7%), Mesir (24,3%), dan Brazil (33,2%).

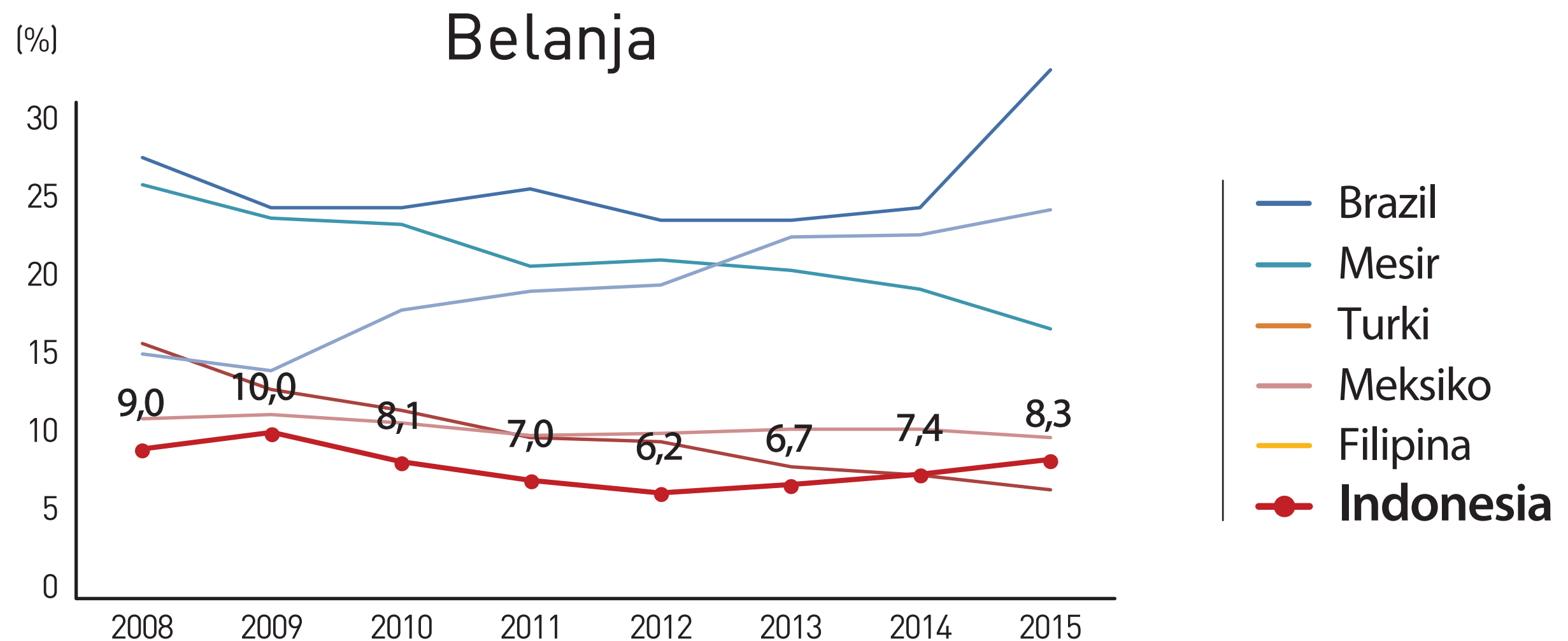
Rasio beban bunga terhadap total utang outstanding, pada tahun 2015, capaian Indonesia (4,7%) lebih baik daripada Filipina (5,5%), Turki (6,6%), Meksiko (6,7%), Mesir (8,8%), dan Brazil (18,0%).

Rasio beban bunga utang terhadap total Pendapatan dan Hibah Indonesia pada tahun 2015 berada pada tingkat 9,9%, relatif lebih baik dibandingkan negara setara seperti Meksiko (11,4%), Filipina (13,8%), Mesir (23,9%), dan Brazil (34,0%).

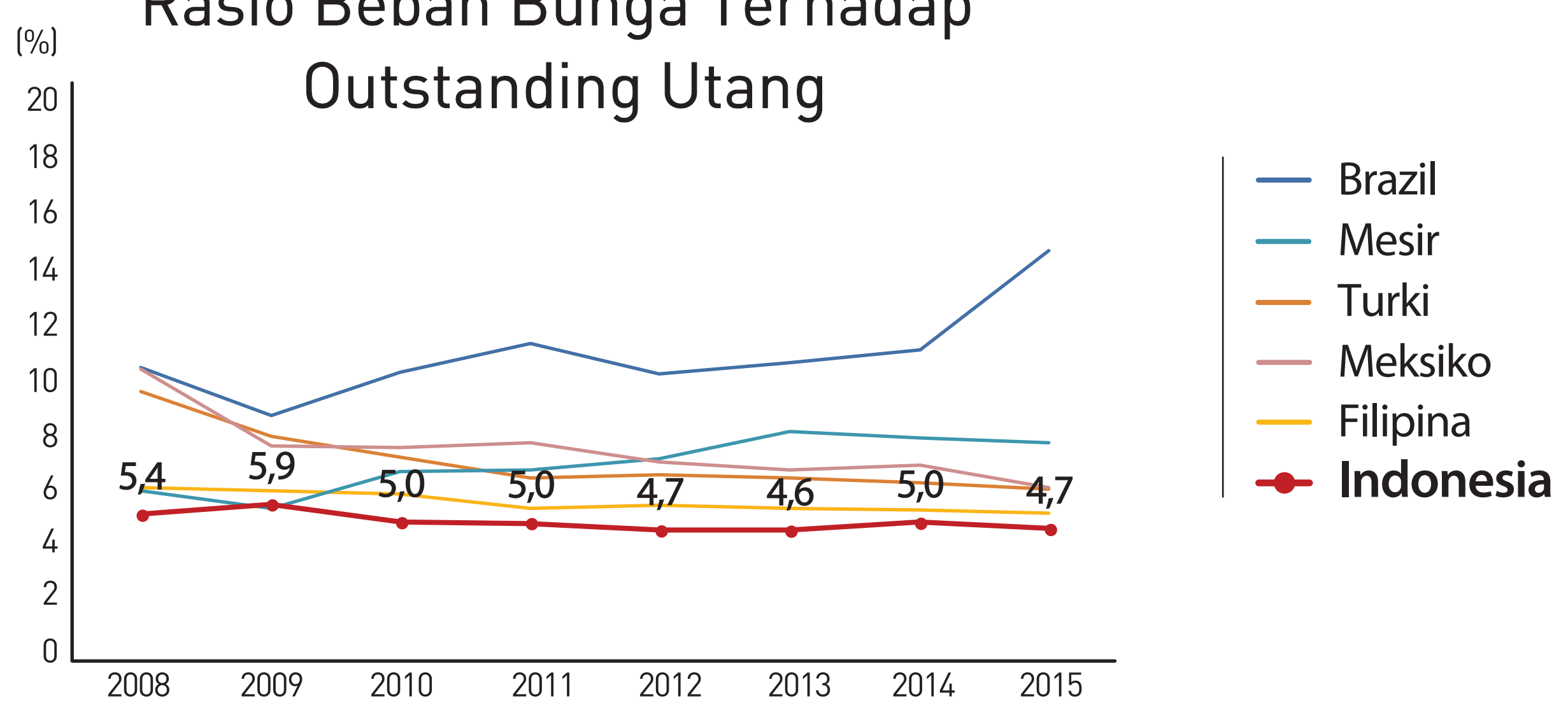
Perbandingan Tingkat Utang 2016
(Rasio terhadap PDB dan tingkat per kapita)



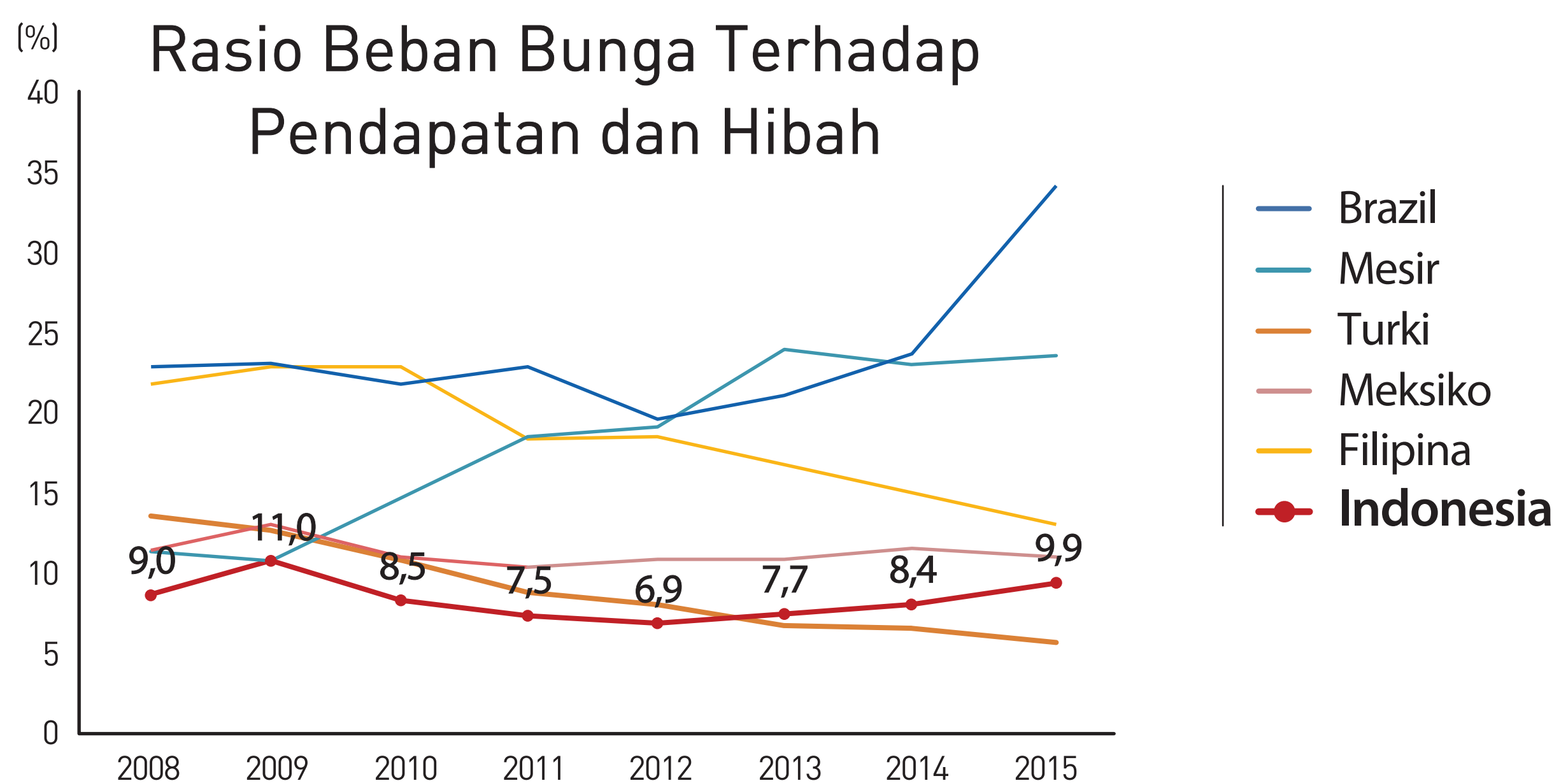
Rasio Beban Bunga Terhadap Belanja



Rasio Beban Bunga Terhadap Outstanding Utang



Rasio Beban Bunga Terhadap Pendapatan dan Hibah



“

Pemerintah akan terus menjaga kebijakan fiskal dan defisit anggaran sesuai aturan perundangan dan dilakukan secara hati-hati, profesional dan bijaksana, sesuai prinsip-prinsip pengelolaan utang global yang dianut oleh semua negara di dunia, sehingga Indonesia dapat terus maju dan sejahtera, namun tetap terjaga risiko keuangan dan utangnya. Utang adalah untuk investasi manusia dan investasi infrastruktur. Dan ini adalah untuk membuat Indonesia menjadi makin kuat, makin sejahtera, sehingga aspek untuk membayar kembali itu terjaga.

Menteri Keuangan
Sri Mulyani Indrawati

”